

BAB II

SEJARAH DAN DINAMIKA PERPOLITIKAN INGGRIS RAYA

Dalam BAB II penulis akan membahas terkait sejarah dan dinamika perpolitikan United Kingdom. Pada bagian awal akan dimaparkan terkait profil singkat dari United Kingdom meliputi kondisi geografis, jumlah demografis dan sistem pemerintahan Inggris. Selanjutnya akan dijelaskan terkait sejarah United Kingdom meliputi sejarah awal terbentuknya kerajaan Inggris, sejarah perekonomian dan sejarah keamanan politik Inggris. Dan bagian terakhir dari bab ini penulis akan mengemukakan terkait bagaimana hubungan Uni Eropa dan Inggris, meliputi profil singkat Uni Eropa, sejarah proses masuknya Inggris kedalam EEC dan referendum Inggris pertama terkait keanggotaan Inggris di EEC.

A. Kontur Kenegaraan United Kingdom

United Kingdom merupakan sebuah negara pulau yang terletak di lepas pantai barat laut daratan Eropa. Terpisah dari benua Eropa, yang dipisahkan oleh Laut Utara dan Selat Inggris, United Kingdom (informal disebut sebagai British) juga merupakan negara besar dengan gabungan dari beberapa negara di dalamnya yang mencakup England, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Total luas Inggris berkisar 243.610 km, dengan luas daratan 241.930 km dan luas lautan 1.680 km. Awal mula asal-usul Inggris dapat ditelusuri ke masa Anglo-Saxon Raja Athelstan yang juga dieja dengan Aethelstan atau Ethelstan (meninggal pada 27 Oktober 939), yang di awal abad ke-10 menjadi raja pertama yang memiliki pemerintahan yang efektif diseluruh daratan. Melalui penaklukan yang dilakukan

selama berabad-abad berikutnya, kerajaan meluas lebih jauh berada di bawah kekuasaan Inggris. Wales, sebuah kumpulan dari kerajaan Celtic berada di barat daya Inggris ini, secara resmi bersatu dengan Inggris oleh *Act of Union* pada 1536 dan 1542. Skotlandia, telah menjadi bagian dari London sejak 1603, namun baru secara resmi bergabung dengan Inggris dan Wales pada tahun 1707 untuk membentuk Inggris Britania Raya (Great Britain).

Kata sifat "British" mulai digunakan pada saat itu untuk menyebut semua orang kerajaan. Irlandia berada di bawah kendali Inggris selama tahun 1600-an dan secara resmi bersatu dengan Inggris melalui *Act of Union* pada 1800. Republik Irlandia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1922, namun enam dari Ulster sembilan kabupaten tetap menjadi bagian dari Inggris sebagai Irlandia Utara. Sekitar 55 persen dari Irlandia Utara 1,6 juta orang (populasi protestan) mencari nenek moyang mereka ke Skotlandia atau Inggris, dan menginginkan untuk kembali bergabung dengan Inggris; Namun, banyak dari populasi Katolik Roma (44 persen) ingin bergabung dengan Republik Irlandia. Nama Britain terkadang digunakan untuk merujuk terhadap Inggris secara keseluruhan. Dengan beribu kotakan London, yang merupakan salah satu pusat komersial, keuangan, dan budaya terkemuka di dunia. Kota besar lain meliputi Birmingham, Liverpool, dan Manchester di Inggris, Belfast dan Londonderry di Irlandia Utara, Edinburgh dan Glasgow di Skotlandia, dan Swansea dan Cardiff di Wales.

Populasi adalah jumlah penduduk secara keseluruhan (kedua gender dan semua umur) di suatu negara disetiap tahunnya, oleh PBB, Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial, Divisi Populasi (worldometers, 2016). Inggris terdiri dari berbagai macam ras didalamnya, ras kulit putih 87.2%, Afrika Inggris 3%, Asia Inggris : India 2.3%, Asia Inggris : Pakistan 1.9%, campuran 2%, lainnya 3.7%. Bersumber dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), departemen urusan ekonomi dan sosial : divisi kependudukan, diproyeksikan bahwa selama 2016 penduduk Inggris Raya meningkat sebesar 407.753 orang dan akan mencapai sebesar 65.336.540 orang di awal 2017, jumlah ini setara dengan 0,88% populasi penduduk dunia. Peningkatan jumlah populasi ini termasuk dalam daerah kewajaran melihat jumlah kelahiran yang melampaui jumlah kematian di Inggris Raya. Dan apabila para imigran yang berasal dari luar Inggris Raya berada pada level yang sama dengan tahun sebelumnya, maka jumlah populasi Inggris Raya akan meningkat sebesar 183.748 orang. Hal ini berarti bahwa jumlah penduduk yang pindah ke Inggris Raya (yang mereka tidak asli) untuk menetap di sana sebagai penduduk tetap (imigran) akan melampaui jumlah orang yang meninggalkan Inggris untuk menetap secara permanen di negara lain (emigran) (United Nations, 2016).

Adapun dinamika perubahan populasi Inggris Raya pada setiap harinya dalam tahun 2016 berkisar : 2.245 kelahiran hidup rata-rata per hari (93,54 dalam satu jam), 1.631 kematian rata-rata per hari (67,97 dalam satu jam), 503 imigran rata-rata per hari (20,98 dalam satu jam). Populasi Inggris Raya (UK) meningkat sebesar 1.117 orang setiap hari pada tahun 2016. Selanjutnya berdasarkan usia,

pada tahun 2016 Inggris Raya (UK) memiliki distribusi usia populasi sebagai berikut:

17.3	66.2	16.5
------	------	------

	Persentase penduduk di bawah 15 (>15)
	Persentase penduduk berusia antara 15 dan 64 tahun (15-64)
	Persentase penduduk 65+ (>65)

Tabel 1 - Persentase penduduk Inggris Raya berdasarkan umur

(Sumber : countrymeter.info)

Dalam angka absolut, distribusi diatas berupa : populasi berusia 15 tahun kebawah berjumlah 11.263.197 orang (5.773.468 pria / 5.489.729 wanita), populasi berusia antara 15 tahun hingga 64 tahun berjumlah 42.956.236 orang (21.725.821 pria / 21.230.415 wanita), sedangkan populasi berusia diatas 64 tahun berjumlah 10.705.354 orang (4.726.816 pria / 5.982.538 wanita). Sedangkan menurut *Central Intelligent Agency*, rasio penduduk Inggris berdasarkan umur ialah : 0-14 tahun : 17.44% (pria 5,761,311/wanita 5,476,649), 15-24 tahun : 12.15% (pria 3,997,150/ wanita 3,830,268), 25-54 tahun : 40.74% (pria 13,367,242/ wanita 12,883,674), 55-64 tahun : 11.77% (pria 3,760,020/ wanita 3,820,525), 65 tahun keatas : 17.9% (pria 5,170,542/ wanita 6,363,047) (CIA, 2016).

Jumlah harapan hidup masyarakat sebuah negara merupakan salah satu indikator demografi yang paling penting. Dikarenakan harapan hidup menunjukkan lama jumlah kelahiran baru setiap tahunnya akan hidup, dengan asumsi bahwa tingkat kelahiran dan kematian akan tetap pada tingkat yang sama sepanjang tahun. Jumlah harapan hidup (kedua gender) saat lahir untuk Inggris Raya (UK) adalah 80,1 tahun. Angka ini adalah di atas harapan hidup rata-rata pada masyarakat dari populasi global yang sekitar 71 tahun (menurut Divisi Populasi Departemen Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa). Dengan rincian harapan hidup laki-laki saat lahir adalah 78 tahun, sedangkan harapan hidup perempuan saat lahir adalah 82,3 tahun (countrymeters, 2016).

Inggris merupakan sebuah negara monarki yang berbentuk parlementer dengan Ratu sebagai kepala negara, dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah Inggris. Maka Perdana Menteri bertanggung jawab untuk semua kebijakan dan keputusan. Badan eksekutif secara harfiah mengacu pada orang-orang yang dibebankan dengan tanggung jawab untuk mengurus administrasi pemerintahan dan pelaksanaan hukum yang dibuat oleh legislatif. Secara teknis, ini termasuk kepala negara, anggota pemerintah dan pejabat yang melayani mereka, serta lembaga-lembaga penegak seperti militer dan polisi. Namun, biasanya istilah ini digunakan untuk menunjukkan sebuah badan yang lebih kecil dari pengambil keputusan yang benar-benar bertanggung jawab untuk arah dan bentuk kebijakan pemerintah (WATTS, 2003).

Perdana Menteri bertanggung jawab dalam mengawasi pengoperasian Layanan Sipil dan instansi pemerintahan, bertanggung jawab untuk menunjuk anggota pemerintahan, perdana Menteri adalah tokoh pemerintah utama dalam House of Commons. Kabinet terdiri dari anggota senior pemerintah. Perdana Menteri memilih anggota kabinet yaitu menteri yang berasal dari anggota House of Commons dan House of Lords. Mereka bertanggung jawab untuk segala tindakan, keberhasilan dan kegagalan dari departemen mereka. Kabinet Inggris keseluruhan berjumlah sebesar 110 orang, dengan satu orang Perdana Menteri, 22 orang kabinet menteri, dan 95 menteri lainnya.

Departemen dan instansi pemerintah bertanggung jawab untuk menempatkan kebijakan pemerintah dalam praktek ataupun realisasi. Beberapa departemen, seperti Departemen Pertahanan, meliputi seluruh United Kingdom. Sedangkan beberapa departemen lainnya tidak demikian, semisal Departemen Pekerjaan dan Pensiun mencakup keseluruhan United Kingdom kecuali Irlandia Utara. Hal ini karena beberapa aspek pemerintah United Kingdom diserahkan kepada Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara. Lembaga eksekutif adalah bagian dari departemen pemerintah yang menyediakan layanan pemerintah dan tidak memutuskan kebijakan, setiap lembaga eksekutif akan diawasi oleh departemen tersendiri. Contohnya adalah Badan Perizinan *Driver and Vehicle* (diawasi oleh Departemen Transportasi).

Konstitusi digambarkan sebagai aturan mendasar di dalam sebuah negara, baik diwujudkan dalam hukum, adat istiadat atau konvensi. Konstitusi didalamnya mengatur terkait bagaimana keputusan dibuat, bagaimana kekuasaan didistribusikan terhadap lembaga-lembaga pemerintah, bagaimana batas kewenangan pemerintah dan bagaimana metode pemilihan dilaksanakan serta bagaimana proses pengangkatan orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan. Konstitusi juga mendefinisikan sebagai hubungan antara negara dan individu dan biasanya termasuk dalam daftar hak-hak warga negara (WATTS, 2003). Dalam bidang legislatif, pembuatan hukum di Inggris melalui beberapa tahap sebelum mereka disahkan oleh Parlemen. The House of Commons dan House of Lords bekerja sama dalam pembuatan hukum. Proses pembuatan hukum di Inggris mencakup dua tahapan, pertama *Acts of Parlement*, Yaitu rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Commons, Lords, dan The Queen. Departemen pemerintah terkait bertanggung jawab untuk menempatkan tindakan dalam praktek ataupun aplikasi. Kedua *Draft Legislations*, kertas putih merupakan garis besar proposal untuk undang-undang baru. Sedangkan kertas hijau digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat sebelum kertas putih dirilis. Rancangan undang-undang merupakan sebuah proposal terhadap undang-undang baru atau perubahan yang sudah ada. Undang-undang yang tetelah disetujui oleh Parlemen, harus disertai persetujuan Ratu sebelum menjadi sebuah hukum (UK Government, 2016).

B. Sejarah United Kingdom

Sejarah menjadi suatu kebutuhan penting untuk memahami sepenuhnya sebuah negara. Inggris memiliki sejarah yang sangat amat berbeda dengan seluruh negara yang ada didunia. Inggris sangat sering menjadi peran penting dalam percaturan dunia, dan tidak jarang menjadi kubu pemenang di dalamnya. Awal kemunculan Imperium Inggris pertama yaitu disaat William, seorang dari bangsa Norman yang juga dijuluki sebagai seorang penakhluk memasukkan Inggris kedalam daerah kekuasaannya di wilayah yang sekarang kita kenal dengan Perancis. Semenjak tahun 1066 yaitu masa awal penaklukan oleh bangsa Norman, hingga tahun 1453 yaitu akhir dari perang seratus tahun. Setiap penguasa Inggris selalu meminta sebahagian dari tanah feodal yang dikuasai oleh para bangsawan Normania yang berada di perancis pada masa itu. Mereka tidak jarang menguasai kota paris dan juga sempat menduduki pelabuhan Calais di Prancis hingga tahun 1558. Imperium Inggris yang kedua meliputi wilayah kekuasaannya di daratan Amerika Utara, didalamnya juga termasuk pulau bermuda dan beberapa pulau di kepulauan karibia. Namun saat ini wilayah kekuasaan imperium Inggris yang masih bertahan hingga sekarang ialah pulau bermuda dan beberapa pulau di karibia.

Imperium ketiga terdiri dari berbagai pelabuhan pengisian batu bara dan beberapa wilayah perdagangan yang dikuasai setelah masa perang Napoleon. Imperium ketiga ini baru diakui secara resmi pada tahun 1876, disaat Ratu Victoria memproklamasikan diri sebagai penguasa Hindia. Dan akhir dari Imperium ini ditandai dengan kembalinya Raja George VI menjadi Raja Britania Raya dan

Irlandia Utara. Semenjak Normandia menjadi bangsa terakhir yang sukses dalam menginvasi negara ini, ada banyak rencana dari bangsa lain untuk menaklukkan bangsa ini, terutama Spanyol di bawah Raja Philip II pada 1588, Perancis di bawah Napoleon di 1803-1805, dan Jerman di bawah Hitler pada tahun 1940. Namun segala penaklukan ini tidak ada yang berhasil satupun (Darlington, 2016).

Setelah berakhirnya Perang Dunia II United Kingdom memerdekakan hampir seluruh wilayah jajahannya disaat itu, namun tetap mengikat mereka kedalam suatu ikatan berupa Persemakmuran Bangsa-Bangsa. Persemakmuran bangsa-bangsa merupakan sebuah wadah politik yang membuat ikatan antara negara-negara atau bangsa-bangsa merdeka bekas jajahan Inggris dengan United Kingdom. Persemakmuran bangsa-bangsa dibentuk sebelum negara-negara jajahan Inggris dimerdekakan untuk mempermudah pembubaran imperium.

Hal yang menarik pada United Kingdom saat ini bukan hanya sejarah besar atas kemenangan negara ini dimasa lalu, namun lebih dari pada itu yaitu hingga saat ini negara ini masih memimpin didepan dalam bidang industrinya. Bangsa Inggris menjadi bangsa pertama yang mempelopori revolusi Industri dan hingga saat ini masih menempati posisi penting di dunia. Dalam sejarahnya bangsa Inggris menjadi bangsa yang paling banyak menemukan penemuan penting. Diantara penemuan penting oleh bangsa Inggris ialah mesin uap, penisilin, mesin jet, radar, radio, TV dan penemuan penting dalam bidang energi ialah penemuan nuklir.

Inggris memiliki kekuatan politik yang besar dimasa Imperium hingga setelah masa perang dunia ke II Inggris kembali menciptakan negaranya sebagai salah satu “negara makmur” di dunia. Inggris menerapkan sistem asuransi yang mampu melindungi segala kelas sosial di negerinya, dimulai dari mereka yang tua, sakit, cacat, lemah, menganggur karena gangguan jiwa akut atau kemelaratan. Sumbangan dari masyarakat Inggris yang berpenghasilan lebih disalurkan kepada mereka yang tidak mampu hidup dengan kehidupan yang layak. Salah satu bagian dari sistem ini ialah Pelayanan Kesehatan Nasional Inggris yang meliputi pemberian pelayanan berupa pengobatan dan pemberian fasilitas rumah sakit. Namun segala pelayanan kesehatan ini tidak lagi diberikan secara gratis semenjak tahun 1948, kecuali terhadap mereka para anak-anak dan para orang tua (Grolier Incorporated, 2000).

1. Sejarah Perekonomian United Kingdom

Dalam sejarah perekonomian, United Kingdom yaitu Great Britain dan Irlandia utara pernah menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Negara ini adalah tempat kelahiran demokrasi modern, Revolusi Industri, dan banyak dari pasar keuangan dan modal yang merupakan dasar dari sistem ekonomi kapitalis.

Selama Periode Abad Pertengahan Inggris menjadi negara pemasok wol untuk industri tekstil di negara-negara ketiga. Seiring berjalannya waktu Inggris mulai memproses wol menjadi benang dan kain sebelum ekspor. Dalam prosesnya pedagang membawa bahan untuk setiap tahap untuk diolah oleh keluarga petani. Ketika wol itu dipintal menjadi benang oleh keluarga pertanian pedagang

mengambilnya untuk membawanya ke tahap berikutnya untuk melanjutkan pengolahan ke tahap menenun benang menjadi kain. Keluarga pertanian biasanya bekerja selama 10-12 jam per hari, dan menghabiskan enam hari dalam seminggu.

Pada abad kedelapan belas mesin diciptakan untuk mengurangi biaya dengan mempercepat produksi dan menghemat tenaga kerja, penemu mesin pintal pertama ialah James Hargreave dengan penemuan mesinnya yang bernama *spinning jenny* (1764) dan kemudian Richard Arkwright menemukan penemuan *water frame* (1769) dan akhirnya mule Samuel Compton dengan penemuan mesin pemintal benang (1774-1779) dan lainnya yaitu John Kay dengan penemuan mesin *flying shuttle* (1733) dan Edmund Cartwright dengan penemuan mesin *power loom* (1785) untuk menenun. Awalnya mesin ini didukung oleh roda air tetapi setelah mesin uap Watt ditemukan pengoprasian ini menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Mesin-mesin skala besar membutuhkan bangunan pabrik dan pekerja yang akan datang ke pabrik berbeda dengan yang sebelumnya cukup dikerjakan di rumah.

Selama periode ini inovasi mekanik terjadi pergeseran besar dalam serat yang digunakan untuk tekstil, berubah dari penggunaan wol menjadi kapas. Mesin pemisah biji kapas yang dibuat oleh Eli Whitney mengurangi biaya dalam mempersiapkan kapas sebagai material baku tekstil untuk selanjutnya dipintal (Watkins, 2016).

Pada puncaknya yaitu pada abad kesembilan belas, Kerajaan Inggris telah mencangkup seperempat dari permukaan dunia. Dengan menggunakan perdagangan yang dilindungi oleh angkatan laut kerajaan, imperialisme Inggris mengembangkan sistem merkantilis global dengan mengangkut manusia, sumber daya dan modal, dan dengan ini menghasilkan keuntungan besar bagi Kekaisaran dan perusahaan utamanya, seperti East India Company, yang pada akhirnya mencangkup banyak wilayah dari mulai India hingga Asia Tenggara.

Perkembangan kekaisaran Inggris banyak didorong oleh persaingan antara kekuatan Eropa dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada bagian awal abad kedua puluh, dua pasukan gabungan mendatangkan bencana hingga menyebabkan Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Meskipun Inggris berada di pihak yang menang di kedua konflik tersebut, kejadian ini sejatinya menuntut harga yang berat. Perekonomian hancur, Kerajaan Inggris terpecah dan Republik Irlandia menarik diri dari Inggris meninggalkan Britania Raya dan pada akhirnya United Kingdom hanya terdiri dari England, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara (EconomyWatch, 2010).

Namun walaubagaimanapun, United Kingdom memiliki perekonomian yang sangat independen, maju, dan negara ini memiliki perdagangan internasional yang berada di garis depan semenjak abad ke-19 yaitu dimasa Revolusi Industri. Negara ini muncul dari Perang Dunia II sebagai pemenang militer namun masih memiliki kelemahan pada sektor manufaktur. Pemulihan pasca perang terbilang relatif lambat, negara ini menghabiskan waktu hampir sekitar 40 tahun, setelah

1973 dengan stimulasi tambahan dari keanggotaan dalam Masyarakat Ekonomi Eropa akhirnya digantikan oleh Uni Eropa (UE), berdampak pada peningkatan daya saing ekonomi Inggris secara signifikan.

Tingkat pertumbuhan perekonomian Inggris pada masa 1990-an terbilang sebagai pertumbuhan ekonomi yang cukup baik jika dibandingkan dengan negara-negara industri maju lainnya. Kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) berkisar sekitar seperlima dari total, dengan jasa pelayanan yang menjadi sumber pertumbuhan terbesar. Kepala hubungan perdagangan Inggris Raya ini telah bergeser dari kerajaan mantan untuk anggota lain dari Uni Eropa, yang menyumbang lebih dari setengah perdagangan barang nyata. Dalam perjalanannya Amerika Serikat menjadi mitra investasi dan perdagangan utama Inggris, sedangkan Jepang menjadi investor yang signifikan dalam produksi lokal Inggris. perusahaan-perusahaan Amerika dan Jepang sering memilih Inggris sebagai basis kerjasama mereka di Eropa dengan negara lainnya (Encyclopedia Britannica , 2016).

2. Inggris dan Perang Dunia Pertama

Perang Dunia Pertama (The Great War) adalah salah satu konflik terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Jumlah total militer dan warga sipil terluka dalam perang itu berkisar sekitar 37,5 juta manusia, dan jumlah yang menjadi korban dalam perang ini berkisar sekitar 16,5 juta manusia, dengan sejumlah besar terdiri dari orang dewasa dengan umur antara 16-40 tahun. Dan Masyarakat Inggris yang menjadi korban dalam Perang Dunia I berkisar sekitar

885.138 orang. Perang telah menghancurkan negara-negara di Eropa dengan kerusakan yang berdampak pada kemerosotan ekonomi pada setiap negara yang terlibat, terkhusus pada negara yang mengalami kekalahan didalam perang ini.

Penyebab yang melahirkan Perang Dunia ke II masih menjadi perdebatan dikalangan para ahli sejarawan. Namun walaupun demikian, terdapat beberapa faktor yang telah disepakati oleh kebanyakan sejarawan, diantaranya ialah peristiwa pembunuhan pangeran Archduke Franz Ferdinand dari kekaisaran Austro-Hungaria di wilayah Sarajevo. Faktor kedua ialah besarnya keinginan Kaiser Wilhelm untuk membuat kekaisaran Jerman di Eropa melebihi kekaisaran Inggris yang telah ada. Faktor ketiga ialah munculnya istilah sekutu atau aliansi diantara negara-negara di Eropa yang menyebabkan ada anggapan diantara mereka teman sealian dan musuh karena berbeda aliansi. Faktor terakhir ialah akibat Jerman menjadi negara yang terkurung didaratan yang membuat Jerman merasa terancam oleh Perancis dan Rusia, dan khawatir dengan kekuatan Inggris di lautan (Brit Politics, 2016).

Pada tahun 1800 dan akhir 1900-an, Inggris sering digambarkan sebagai di 'Isolasi Splendid' dari seluruh Eropa. Inggris memiliki sebuah kerajaan besar hingga penguasaan dan pengendalian Inggris terhadap kerajaan ini menjadi prioritas utama. Kunci kekuatan Inggris adalah India dengan sumber daya yang luas dalam hal tenaga kerja. Inggris sangat bergantung pada pasukan India untuk mengendalikan kekaisaran. Prioritas tertinggi Inggris ialah melindungi rute perdagangan antara Inggris dan India. Angkatan Laut Inggris yang besar, Inggris

menfokuskan kekuatan yang besar ini untuk melindungi rute dagangnya dengan India dan seluruh dunia.

Terlepas dengan fokus Inggris terhadap ini semua, Inggris telah mulai tertarik dengan segala peristiwa yang berlangsung di Eropa. Belgia dan Prancis memiliki wilayah yang luas di Afrika dan menjadi rival Inggris dalam penguasaan wilayah di daerah Afrika Utara. Pada tahun 1990-an Jerman juga memiliki daerah koloni Di Afrika dan mulai menunjukkan ketertarikannya terhadap Afrika Utara.

Fokus Inggris lainnya tertuju pada Rusia. Sebagian besar dari abad ke 19 merupakan fokus Rusia untuk menguasai daerah Dardanelles, yaitu area dimana laut hitam terbuka menuju Laut Mediterania. Hal ini dikarenakan apabila Rusia mampu menguasainya, selanjutnya akan mempermudah kapal perang Rusia dan kapal dagang Rusia untuk berlayar di lautan Eropa. Rusia telah memiliki pelabuhan di daerah utara namun selalu membeku di saat musim dingin. Yang menjadi masalah ialah karena daerah Dardanelles merupakan kepemilikan dari Kerajaan Turki Ottoman yang telah menjadi musuh Rusia sejak lama. Inggris mendukung Turki untuk mencegah Rusia menguasai daerah tersebut dikarenakan Inggris tidak menginginkan Rusia sampai ke laut Mediterania yang menjadi rute penting Inggris menuju ke daerah Hindia.

Hingga awal dari abad ke 19, Inggris lebih fokus kepada Rusia dan Prancis ketimbang Jerman. Hubungan Inggris dengan Jerman terjalin dengan sangat baik walaupun kemudian menjadi berbalik. Ketika Kaiser Wilhelm II mengambil kuasa penuh dari Jerman, dia memiliki keinginan besar untuk menjadikan Jerman menjadi

negara besar di daratan Eropa. Dia merasa Jerman dikelilingi oleh kekuatan besar, dari Timur berhadapan dengan Rusia, sedangkan dari Barat berhadapan dengan Perancis. Olehkarnanya, untuk melindungi negaranya Jerman memutuskan untuk membangun kekuatan militernya dan disusul oleh Rusia dan Perancis karena merasa tereancam oleh Jerman. Selama abad ke 19, semua negara besar di Eropa berfokus pada pembangunan kekuatan militer dan angkatan laut yang kuat.

Pada masa itu Inggris tidak menginginkan ada kekuatan yang dominan di daratan Eropa, juka Rusia, Perancis, Jerman dan Austria-Hungaria mengkhawatirkan satu sama lainnya, maka tidak akan menjadi ancaman bagi Inggris. Pada tahun 1907 Inggris menyadari bahwa negara yang akan mengancam Inggris ialah Jerman. Kekuatan ekonomi yang besar, jumlah populasi yang besar dan kekuatan militer yang kuat, memungkinkan Jerman untuk menjadi kekuatan besar di Eropa. Dan oleh karnanya Inggris mulai mendukung Rusia dan Perancis. Namun walaupun Inggris mendukung Rusia dan Perancis, Inggris tidak memiliki niatan untuk ikut dalam perang pada tahun 1914. Menteri luar negeri Inggris, Sir Edward Grey menghabiskan banyak waktu pada musim panas tahun 1914 untuk meyakinkan Rusia dan Jerman untuk tidak memulai peperangan.

Jerman menginginkan Inggris untuk tidak mencampuri kedalam perang sama sekali. Walaupun Jerman mengetahui bahwa Inggris telah membuat kesepakatan dengan Belgia dibawah Treaty London pada tahun 1839 untuk menjaga tanah Belgia. Jerman menginginkan Inggris untuk menghiraukan perjanjian itu, dan membiarkan militer Jerman memasuki Belgia. Pemerintahan

Inggris berusaha kuat untuk melindungi daratan Belgia. Pelabuhan Belgia sangatlah dekat dengan wilayah Inggris, dan pengusaan Jerman terhadap Belgia tampak sebagai ancaman besar bagi Inggris. Dan pada akhirnya Inggris mengambil keputusan untuk tidak menghiraukan peristiwa 4 Agustus 1914, yaitu ketika Jerman menyerang Prancis melalui Belgia. Dalam waktu kurang dari satu jam Inggris menyatakan perang terhadap Jerman.

Dan dalam beberapa hari kemudian Inggris, Prancis, dan Rusia resmi menjadi sebuah sekutu untuk memerangi Jerman dan Austri-Hungaria. Walaupun dimulai dengan peristiwa kecil, namun pada akhirnya peristiwa ini berakibat pada peperangan besar yang pernah terjadi dalam sejarah (The National Archives, 2016). Perang Dunia Pertama berakhir pada pukul 11 tanggal sebelas November tahun 1918. Yang diawali dengan permintaan panglima tentara Jerman pada pemerintahan Jerman untuk mengakhiri peperangan yang selanjutnya diikuti oleh lengsernya Kiser Wilhelm (pemimpin Jerman pada saat itu) pada 9 November 1918. Dua hari kemudian, Jerman menandatangani perjanjian gencatan senjata. Masyarakat di Inggris, Prancis dan semua negara yang mendukung mereka, merayakan akhir perang - perang yang telah berlangsung empat tahun empat bulan. Di London, kerumunan besar masyarakat Inggris berkumpul memenuhi wilayah Trafalgar Square (BBC.co.uk, 2014).

3. Inggris dan Perang Dunia ke II

Perang Dunia ke II dapat diklasifikasikan sebagai masa yang paling signifikan pada sejarah peradaban dunia. Masa ini membawa perkembangan teknologi besar bagi umat manusia dan meletakkan dasar perubahan yang mendasar bagi kehidupan sosial masyarakat dunia, di dalamnya termasuk berakhirnya masa kolonialisme dunia, munculnya gerakan hak asasi manusia di Amerika, munculnya gerakan emansipasi wanita hingga program untuk menjelajahi luar angkasa (History Net, 2016). Faktor politik menjadi penyebab mendasar yang berkontribusi besar pada pecahnya Perang Dunia ke II. Dilatarbelakangi dengan kondisi dan kesulitan yang dibebankan atas Jerman oleh akibat kekalahannya dalam (Great War) Perang Dunia II 1914-1918. Perjanjian Versailles pada tahun 1919 yang berdampak pada pembatasan militer dan industri militer Jerman menjadi pukulan besar terhadap negara ini.

Gejolak ekonomi dan politik dari 1920 hingga awal 1930 menjadikan Jerman sebagai negara yang lemah hingga muncul perselisihan politik internal di dalam pemerintahan Jerman. Kondisi ini berdampak pada munculnya sosok Adolf Hitler sebagai Kanselir Jerman pada tahun 1933. Dalam kepemimpinannya, Hitler membangun kembali kebanggaan bangsa Jerman terhadap bangsanya hingga menguatkan rasa nasionalisme pada masyarakat Jerman di masa itu. Adolf Hitler memiliki ambisi pribadi untuk menjadikan Jerman sebagai negara yang dominan di Eropa dan dunia dengan melampaui kekuatan besar yang telah ada sebelumnya seperti Italia, Perancis dan Inggris.

Di Asia-Pasifik, Jepang telah memulai dominasi negaranya terhadap negara-negara tetangga dari semenjak awal abad kedua puluh dengan penaklukan militer di Korea dan Cina. Pada tahun 1930 Jepang melihat dirinya sebagai kekuatan regional yang dominan di Asia-Pasifik dan merasa memiliki kebutuhan untuk melindungi kepentingan ekonominya dan keinginan untuk memperluas wilayah jajahannya. Hal ini kemudian menyebabkan Jepang ingin memperluas daerahnya ke wilayah yang lebih luas dengan menantang negara-negara Eropa seperti Inggris, Perancis dan Belanda. Kedua peristiwa diatas baik di Asia dan di Eropa menjadi faktor terbesar yang melatarbelakangi pecahnya Perang Dunia ke II.

Dalam dua teater utama Perang Dunia II yaitu di Eropa dan Asia Pasifik berdampak pada terbentuknya aliansi politik dan militer di dalamnya. Di Eropa, Jerman bersekutu dengan Italia sedangkan Inggris bersekutu dengan Perancis. Jerman membentuk pakta non-agresi dengan Uni Soviet yang kemudian batal pada Juni 1941. Di Asia-Pasifik Jepang bertindak sendirian dalam perluasan kekuasaan kekaisaran Jepang di seluruh wilayah Asia Pasifik hingga pada akhirnya berhadapan langsung dengan Amerika Serikat pada bulan Desember 1941. Masuknya Amerika Serikat ke dalam Perang Dunia Kedua pada 1941 menyebabkan Inggris yang pada awalnya berjuang sendirian dengan sekutu Commonwealth nya memiliki sekutu baru yang kuat (Brit Politics, 2016).

Keterlibatan Inggris di dalam Perang Dunia ke II baik di Eropa maupun di Asia Pasifik dilatar belakangi oleh keinginan Inggris untuk melindungi kekuasaan kerajaan Inggris dari Jerman di Eropa maupun Jepang di Asia Pasifik. Di Eropa

Inggris berusaha untuk melindungi kerajaannya dari keinginan Jerman untuk menguasai seluruh daratan Eropa. Sedangkkn di Asia Pasifik, Inggris berusaha melindungi daerah kolonialnya dari serangan kekaisaran Jepang. Perang Dunia ke II menjadi perang yang memakan korban paling banyak di dalam sejarah. Lima puluh juta manusia menjadi korban dalam perang ini, tiga puluh korban manusia berasal dari daratan Eropa dan dua puluh korban manusia berasal dari daratan Asia (History of England, 2016).

Perang Dunia ke II resmi berakhir pada 15 Agustus 1945 dengan pernyataan Jepang untuk menyerah dan mengakui kekalahannya. Berakhirnya Perang Dunia ke II kemudian menjadi awal dari munculnya Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet dengan kekhawatiran dunia atas pecahnya perang nuklir antara kedua negara ini (History Net, 2016). Inggris memiliki sejarah yang amat besar dalam perjalanan waktu. Dalam sejarahnya Inggris selalu menjadi negara yang berada dalam posisi yang menang. Inggris tidak pernah dijajah oleh bangsa lain kecuali oleh bangsa Norman yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan besar ini. Inggris menjadi negara dengan wilayah kolonialisme terbesar dibandingkan dengan negara besar di Eropa lainnya. Bahkan dalam proses kemerdekaan negara kolonialnya Inggris masih membuat ikatan dengan setiap negara kolonialnya dalam sebuah wadah yang disebut persemakmuran Bangsa (Commonwealth).

C. Munculnya Uni Eropa Dan Masuknya Inggris Dalam Uni Eropa

1. Sejarah dan Kontur Dari Institusi Uni Eropa

Sejarah Uni Eropa mencatat bahwa organisasi ini lahir dari keterpurukan setelah berakhirnya perang dunia kedua dengan bersandarkan ide “*Never Again War*”. Perang dunia kedua menjadikan negara-negara di Eropa menjadi tempat yang menakutkan untuk dihuni oleh manusia, hingga berakhirnya perang negara-negara ini harus berusaha dengan susah payah untuk membangun kembali negara yang telah tidak layak untuk dihuni.

untuk memastikan bahwa perang di Eropa tidak akan mungkin. Tujuan politik yang mendasari Perjanjian itu juga untuk memperkuat Franco-Jerman hubungan dan membuat kedua negara tergantung satu sama lain untuk mencegah konflik di masa depan. Para pendiri berharap ECSC akan menyebabkan integrasi ekonomi yang lebih besar antara negara anggota. Dilatarbelakangi dengan keinginan untuk membangun kembali hubungan antar negara agar tetap akur, serta keinginan untuk membangun kembali negara yang telah hancur oleh perang, maka pada tahun 1951 beberapa negara Eropa yang terdiri dari Prancis, Jerman, Italia dan Benelux (Belgia, Belanda dan Luxembourg) menandatangani Perjanjian Paris, mendirikan Coal Eropa dan Baja Masyarakat (ECSC), yang bertujuan untuk menyatukan sumber daya batubara dan baja di bawah satu badan supranasional (Miller, *The UK in the European Union: in brief*, 2014).

Beberapa tahun kemudian negara-negara yang tergabung dalam ECSC berinisiatif untuk membuat sebuah pasar tunggal untuk perdagangan yang menguntungkan bagi masing-masing negara. Dan pada tahun 1957 dengan dilandasi perjanjian Rome berdirilah sebuah komunitas negara-negara ini dengan nama awal saat berdirinya yaitu EEC (European Economic Community) (European Union, 2016).

Hingga hari ini Uni Eropa menjadi salah satu dari organisasi regional terbaik di dunia dengan penerapan *Single Market* dan empat kebebasan fundamental didalamnya, yaitu *free movement of persons*, *free movement of goods*, *free movement of services* dan *free movement of capital* (Federal Department of Foreign Affairs FDFA, 2016). Penerapan beberapa kebijakan diatas berdampak pada keuntungan besar bagi seluruh penduduk negara yang menjadi bagian dari Uni Eropa. Seperti halnya, setiap penduduk Uni Eropa memiliki kebebasan untuk bepergian kenegara anggota Uni Eropa lainnya dengan tanpa persyaratan visa. Kebijakan Uni Eropa diatas juga mampu menciptakan jutaan lapangan pekerjaan bagi para penduduk negara Anggota, sebagaimana yang dilansir oleh *Centre for Economics and Business Research* pada oktober 2015, bahwa sekitar 3,1 juta lapangan pekerjaan di Inggris bersandarkan pada ekspornya ke Uni Eropa (Lewis, 2016).

Dari masa ke masa Uni Eropa terus memperluas kualitas diri dimulai dalam hal wilayah hingga integrasi di dalamnya. Tujuan dari Uni Eropa adalah untuk mempromosikan Eropa yang lebih harmoni melalui pengaplikasian pasar tunggal

yang memungkinkan kebebasan pergerakan barang, jasa dan manusia. Uni Eropa telah membuka manfaat dari segi politik dan hukum yang luas, negara-negara Uni Eropa tidak lagi berselisih seperti mereka di masa lalu. Dengan pengecualian dari perang saudara di Yugoslavia (yang bukan merupakan bagian dari Uni Eropa pada saat itu), Eropa telah berhasil menyembuhkan perpecahan yang begitu menyakitkan saat Perang Dunia kedua di abad ke dua puluh.

Uni Eropa dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2012 untuk membantu mempromosikan perdamaian dan kerjasama internasional. Banyak negara-negara Eropa Timur yang tertarik untuk bergabung dengan Uni Eropa karena mereka merasa itu akan membantu mempromosikan stabilitas ekonomi dan politik. Sedangkan dalam segi hukum dan hak asasi manusia, Uni Eropa memiliki komitmen yang kuat untuk hak asasi manusia, diskriminasi mencegah dan proses hukum. Hal ini membuat Uni Eropa menarik bagi negara-negara, seperti Ukraina yang ingin berbagi dalam hukum dan hak asasi manusia yang sama.

Uni Eropa merupakan salah satu daerah ekonomi terkuat di dunia, dengan 500 juta jiwa didalamnya, organisasi ini memiliki 7,3% dari populasi dunia, dan dengan jumlah penduduk yang demikian organisasi ini mampu menjadi penyumbang 23% dari GDP global. Perdagangan bebas dan penghapusan hambatan non-tarif telah membantu mengurangi biaya dan harga yang harus dibayar oleh konsumen. Peningkatan perdagangan ke Uni Eropa menciptakan lapangan kerja dan pendapatan yang lebih tinggi. Lebih dari 52% dari ekspor Inggris tersalurkan

ke Uni Eropa. Perdagangan dalam Uni Eropa telah meningkat 30% sejak tahun 1992 (Pettinger, 2016).

Sebagaimana yang dilansir oleh The National Achieve yang dikelola oleh Department for Business, Innovation & Skills dibawah pemerintah Inggris menjelaskan bahwa pasar tunggal berarti bahwa individu memiliki hak untuk hidup, bekerja atau belajar di negara Uni Eropa. Menurut Komisi Eropa, lebih dari 15 juta warga Uni Eropa telah pindah ke negara-negara Uni Eropa lainnya untuk bekerja atau untuk menikmati pensiun mereka, manfaat dari pengalihan manfaat sosial, sementara 1,5 juta orang muda telah menyelesaikan bagian dari studi mereka di Negara Anggota lain dengan bantuan program Erasmus. Kemungkinan untuk belajar di luar negeri dianggap positif oleh 84% dari warga negara Uni Eropa. Kemudianpun hak para karyawan telah sangat diperkuat melalui peraturan yang telah dibuat oleh Uni Eropa. Pekerja (selain dari yang di sejumlah kecil industri tertentu) tidak dapat diminta untuk bekerja lebih dari 48 jam per minggu, kecuali mereka ingin. Mereka berhak untuk istirahat sisa setidaknya 11 jam setiap hari dan istirahat lebih lanjut jika hari kerja lebih dari enam jam. Selain itu, mereka berhak untuk satu hari libur per minggu dan libur tahunan yang dibayar minimal empat minggu setiap tahun (Department for Business, Innovation & Skills, 2010).

Pekerja paruh waktu dan mereka pada kontrak jangka tertentu berhak atas manfaat yang sama seperti mereka yang berada dalam kontrak permanen termasuk tingkat yang sama dari gaji, akses yang sama untuk tunjangan sakit dan akses yang sama untuk program pensiun perusahaan, kecuali perbedaan perlakuan yang

obyektif dibenarkan. Bagi karyawan dengan tanggung jawab sebagai orang tua memiliki hak untuk minimal tiga belas minggu meninggalkan untuk memungkinkan mereka untuk mengurus anak hingga usia lima tahun, atau delapan belas minggu meninggalkan dalam kasus seorang anak cacat di bawah usia 18 tahun (Department for Business, Innovation & Skills, 2010).

Dari semua penjabaran informasi diatas, semuanya mengerucut pada segala keuntungan-keuntungan yang besar dan bisa didapatkan oleh setiap anggota negara yang menjadi bagian dari Uni Eropa. Dengan segala kebijakan-kebijakan yang ada dalam Uni Eropa yang terus diperbaharui dari tahun ke tahun, menjadikan Uni Eropa sebagai salah satu aktor global yang terbaik, sehingga menjadikannya diminati oleh banyak negara-negara Eropa lainnya yang belum menjadi anggota dari Uni Eropa.

Uni Eropa dalam sejarah keanggotaan negara didalamnya bergerak secara dinamis dari tahun ke tahun. Semakin bertambah matangnya organisasi kawasan Eropa ini, semakin bertambah pula negara-negara yang ikut untuk bergabung di dalam organisasi kawasan ini. Namun, seiring bertambahnya negara yang berkeinginan untuk memasuki Uni Eropa, disisi lain Inggris menawarkan diri untuk keluar dari Uni Eropa. Hal ini sangatlah berlawanan dengan derasnya arus negara-negara Eropa yang berkeinginan untuk memasuki Uni Eropa. Ketika Inggris menggagas wacana untuk keluar dari Uni Eropa, disisi lain negara-negara seperti Turkey, Albania, acedonia, Montenegro dan Serbia membutuhkan usaha ekstra untuk berusaha masuk kedalam Uni Eropa dan hingga saat inipun negara ini masih

menjadi pertimbangan bagi negara-negara di Uni Eropa untuk menjadi anggota di dalamnya.

2. Inggris menjadi anggota dari Uni Eropa

Setiap negara memiliki persepsi tersendiri terhadap kedudukan mereka di dunia, yang dengannya menciptakan identitas dan cara mereka menjalankan hubungan mereka dengan negara lainnya. Sejarah kerajaan Inggris telah secara signifikan mempengaruhi cara para elit politik Inggris melihat negara-negara di Eropa. Akhir dari abad ke 16 dan awal dari abad ke 17 menjadi awal dari berdirinya kolonial Inggris. Yang kemudian perkembangan kolonial Inggris membuat Inggris menjadi kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia. Kekaisaran ini memiliki daerah kolonial di setiap benua dan di semua lautan. Pada abad ke 20 kekaisaran melihat penurunan yang drastis dan akhirnya Hong Kong dikembalikan ke China, dan semua daerah kolonial kekaisaran Inggris menjadi negara yang merdeka.

Pada paruh awal abad ke 20 Inggris mendirikan negara-negara persemakmuran (Commonwealth). Ini merupakan asosiasi sukarela yang member didalamnya terdiri dari negara-negara bekas kolonial Inggris. Semua negara ini telah menjadi negara yang merdeka yang berdaulat, namun mereka semua kurang lebih secara simbolis tetap loyal kepada kerajaan Inggris. Dengan demikian, Inggris telah menjadi negara yang mengukir sejarah peradaban dunia selama tiga abad, maka tidak mengherankan bahwa banyak dari politisi Inggris dan sebagian besar dari populasi Inggris masih merasa bahwa Inggris lebih unggul dibandingkan negara-negara Eropa lainnya.

Selanjutnya, menjadi negara anggota Uni Eropa bagi sebagian besar negara melihatnya sebagai langkah positif untuk menjangkau dunia dan sebagai sarana untuk meningkatkan komunikasi dengan negara-negara lain. Bagi negara-negara kecil seperti Slovenia bergabung dengan Uni Eropa merupakan sebuah keuntungan besar bagi mereka, sementara yang lainnya melihatnya sebagai ladang untuk memperbaiki citra mereka yang kurang baik di masa lalu semisal Jerman. Sedangkan bagi Inggris, bergabung dengan Uni Eropa terlihat sebagai penghalang pergerakan dan pengaruh mereka di dunia. Hal ini dapat disebut sebagai penghalang psikologis dan ini akan mengakibatkan pada ketidaknyamanan hubungan antara Inggris dan Uni Eropa (Perisic, 2010).

Komplikasi lainnya muncul dari fakta bahwa Inggris bukan merupakan bagian dari negara-negara pendiri Uni Eropa. Negara-negara pendiri telah meletakkan aturan dasar yang tidak mudah diubah sehingga akan menyulitkan negara-negara yang nantinya akan bergabung dengan Uni Eropa karena harus beradaptasi dengan aturan yang sudah ada. Pada masa awal pembuatan Uni Eropa Inggris memiliki beberapa kesempatan untuk menjadi satu dari beberapa negara pendiri namun Inggris memilih untuk meninggalkannya. Pada masa awal pendirian ECSC yaitu pada sekitaran periode 1950-an, pemerintahan Inggris mendapat undangan untuk ikut serta dalam negosiasi pembuatannya, namun secara resmi Inggris menolak tawaran tersebut.

Kemudian setelah ECSC berjalan, enam negara pendiri berencana untuk memperluas daerah kerjasama didalamnya dari awal hanya kerjasama dibidang batu bara dan baja menjadi kerjasama ekonomi yang lebih umum. Maka pada tahun 1957 disepakatilah perjanjian Rome yang dengannya terciptalah Masyarakat Ekonomi Eropa dan Masyarakat Energi Atom Eropa. Ini menjadi peristiwa penting pada berdirinya institusi Masyarakat Eropa modern, namun pemerintahan konservatif Anthony Eden tidak melihat ini sebagai hal yang penting sehingga menolak untuk menandatangani perjanjian itu. Dan selanjutnya enam anggota EEC berkembang pesat dalam hal ekonomi sedangkan ekonomi Inggris mengalami penurunan secara berkelanjutan. Setelah kesuksesan besar EEC akhirnya Inggris memutuskan untuk ikut bergabung.

Pada tahun 1961 Pemerintah Konservatif, yang dipimpin oleh Harold Macmillan, tiba pada kesimpulan bahwa bukan merupakan ide yang buruk untuk bergabung menjadi anggota dari EEC. Maka pada agustus 1961 Inggris mengajukan diri untuk bergabung menjadi bagian dari EEC namun Presiden Prancis De Gaulle skeptis akan keberadaan Inggris dalam organisasi ini. Pada tahun 1963, De Gaulle mengumumkan vetonya terhadap keanggotaan Inggris di EEC, dengan alasan kepentingan politik dan ekonomi Inggris tidak sejalan dengan seluruh negara anggota EEC dan bahwa Inggris tidak memiliki niatan kuat untuk integrasi Eropa. Langkah ini dilakukan Prancis atas dasar ketakutan bahwa hubungan Anglo-Amerika yang dekat akan mempengaruhi Eropa jika Inggris menjadi anggota.

Pada bulan Mei 1967, Perdana Menteri Inggris Harold Wilson kembali mengusulkan keanggotaan kepada EEC. Pada bulan November 1967 General de Gaulle melakukan hal yang sama dengan memveto tawaran kedua Inggris untuk keanggotaan EEC, meskipun lima anggota EEC lainnya mendukung keanggotaan Inggris. Beberapa tahun kemudian yaitu pada tahun 1969 Inggris kembali mengajukan keanggotaan pada EEC, dan tidak seperti pendahulunya Charles de Gaulle, Presiden Perancis yang baru Georges Pompidou tidak menentang keanggotaan Inggris dalam EEC dan kemudian negara-negara anggota sepakat untuk membuka negosiasi dengan Inggris. Maka pada tahun 1973 bersama Perdana Menteri Edward Heath, Inggris resmi bergabung dengan EEC bersama negara lainnya Denmark dan Irlandia (OXFORD Higher Education, 2015).

3. Referendum Inggris dan Uni Eropa pertama

Tahun 1975 menjadi masa dimana referendum nasional pertama Inggris diadakan untuk menentukan keanggotaan Inggris di EEC. Komplain yang menggemakan besar saat itu lebih terkait besarnya dana yang harus Inggris bayarkan untuk EEC dengan keuntungan yang sedikit bagi Inggris. Referendum pada tahun 1975 merupakan agenda yang diusulkan oleh partai buruh akibat kekhawatiran partai ini terkait integrasi Inggris ke dalam EEC. Setelah dua usulan keanggotaan Inggris ke dalam EEC, akhirnya pada saat Inggris dipimpin oleh partai Konservatif Inggris berhasil menjadi anggota dari EEC pada tahun 1973. Di lain pihak keanggotaan Inggris dalam EEC dianggap sebagai sebuah kekhawatiran oleh partai Buruh. Partai Buruh menilai bahwa keanggotaan Inggris di EEC hanya akan menjadi

beban bagi Inggris karena Inggris harus mengeluarkan terlalu banyak biaya dengan sedikit manfaat. Sementara itu partai Buruh berjanji akan mengembalikan keputusan ini kepada seluruh orang-orang Inggris dengan mengadakan referendum (Glencross, 2015).

Semuanya berawal setelah berakhirnya Perang Dunia ke II, disaat Pemerintahan Buruh Clement Attlee menolak akan gagasan terciptanya institusi the European Coal and Steel Community (ECSC). Partai buruh terus mempertahankan posisinya sepanjang 1950-an hingga awal 1960-an. Selain itu Partai ini juga menentang usulan Partai Konservatif untuk bergabung dengan EEC pada tahun 1961. Namun hal yang berbeda pada pemilu Inggris 1966, Partai Buruh menyatakan bahwa bergabung dengan EEC akan menjadi tujuan dari pemerintahan ketika partai ini memenangkan pemilu. Pada Oktober 1964, Harold Wilson menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris menyatakan bahwa kebijakan pertanian dalam EEC merupakan sebuah kendala utama dikarenakan akan berdampak serius pada impor negara persemakmuran.

Namun pada Mei 1966 Pemerintahan Partai Buruh menyatakan bahwa Inggris memiliki keinginan untuk menjadi anggota dari EEC. Pada pemilu Inggris tahun 1970, Partai Buruh berkomitmen kuat untuk bergabung dalam keanggotaan EEC. Namun yang memenangkan pemilu Inggris 1970 ialah Partai Konservatif, maka kemudian Perdana Menteri Edward Heath mengajukan keanggotaan EEC pada tahun berikutnya. Sebagai pemimpin dari kubu oposisi, Harold Wilson sangatlah kritis terhadap bentuk negosiasi yang dilakukan oleh Edward Heath untuk

keanggotaan Inggris dalam EEC. Maka Harold Wilson berjanji akan mengadakan renegotiasi terkait keanggotaan Inggris dalam EEC apabila Partai Buruh terpilih dalam pemilu yang akan datang. Pemerintahan Konservatif pada awalnya mendapat dukungan dari partai oposisi untuk membuat keputusan melalui parlemen dan tidak melibatkan publik. Namun pada Maret 1972, Partai Buruh bergabung dengan eurosceptic dari Partai Konservatif mengajukan untuk mengadakan referendum sebelum seutuhnya bergabung dengan EEC. Selanjutnya pada Januari 1973 Edward Heath berhasil membawa keanggotaan Inggris dala EEC bersama dua negara lainnya.

Pada Maret 1974 Harold Wilson resmi menjadi Perdana Menteri Inggris setelah kemenangan Partai Buruh dalam pemilu Inggris Oktober 1974 dengan kemenangan tipis. Dua hal yang menjadi pernyataan yang dikemukakan Partai Buruh pada pemilu Inggris tahun 1974 yaitu mengadakan renegotiasi terkait keanggotaan Inggris dalam EEC dan melanjutkan dengan pengadaan referendum untuk penentuan keanggotaan Inggris dalam EEC. Setelah kemenangan pada Februari 1974 dalam pemilu Inggris, Harold Wilson melihat harus memenuhi janjinya pada masa kampanye, maka Harold Wilson meminta pemimpin dari setiap negara anggota EEC untuk memberi kelonggaran bagi Inggris.

Keputusan untuk mengadakan referendum menjadi suatu hal yang kontroversial bagi kalangan parlemen Inggris. Sebagian besar politikus yang menginginkan Inggris menetap di EEC tidak menginginkan adanya referendum. Edward Heath mantan Perdana Menteri Inggris sebelumnya menentang referendum

sebagai perangkat konstitusional. Sedangkan Margaret Thatcher sebagai pemimpin terpilih Partai Konservatif pada bulan Februari 1975, menyebut referendum sebagai perangkat diktator dan demagog. Pendukung referendum terdiri dari mereka yang menginginkan Inggris untuk meninggalkan EEC dan sebagian besarnya terdiri dari pendukung Partai Buruh. Salah satu pendukungnya Tony Benn mengatakan bahwa referendum akan membuat pemerintah benar-benar bertanggung jawab kepada pemilih. Keputusan resmi pemerintahan Inggris pada 26 Februari 1975, terkait referendum keanggotaan Inggris dalam EEC, memutuskan bahwa referendum akan diadakan setelah hasil dari renegosiasi antara Inggris dan EEC mencapai hasil.

Pada referendum tahun 1975 pemerintah setuju untuk menanggukkan konvensi normal yang berlaku dan setiap anggota kabinet bebas untuk berkampanye dengan posisi yang berbeda. Para pendukung Inggris untuk menjadi anggota EEC dalam referendum mayoritas terdiri dari anggota pemerintahan Inggris Harold Wilson dan sebagian besar dari kabinetnya, termasuk didalamnya Denis Healey sebagai Menteri Keuangan Britania Raya, James Callaghan sebagai Menteri Luar Negeri, dan Roy Jenkins sebagai Sekretaris negara. kelompok ini juga didukung oleh mayoritas dari Partai Konservatif, termasuk di dalamnya Margaret Thatcher, Partai Liberal, Partai Sosial Demokrat dan Partai buruh, aliansi partai Irlandia utara dan partai Vanguard persatuan progresif. Tujuh dari 23 anggota kabinet tidak mendukung Inggris untuk berada dalam keanggotaan EEC, diantaranya : Michael Foot (Ketenagakerjaan), Tony Benn (Perindustrian), Peter Shore (Perdagangan), Barbara Castle (Layanan Sosial), Eric Varley (Energi), William Ross (Skotlandia) dan John Silkin (Perencanaan dan Pemerintah Daerah).

Para pendukung keanggotaan Inggris di EEC mendapat dukungan dari pergerakan Eropa, komunitas bisnis, para jurnalis dan gereja Inggris. Sedangkan para pendukung Inggris keluar dari EEC terdiri politikus dari sayap kiri Partai Buruh, sayap kanan Partai Konservatif dan beberapa dari Partai nasionalis di Ulster, Scotland dan Wales. Setelah renegosiasi antara Inggris dan EEC, pemerintah Inggris mengeluarkan pamflet yang berisikan hasil dari pertemuan antara pemimpin dari sembilan negara anggota EEC. Pemerintahan Harold Wilson merekomendasikan bagi para pemilih dalam pemilu untuk memilih kelanjutan keanggotaan Inggris di EEC. Referendum dilaksanakan pada 5 Juni 1975, dengan pemilih terdiri dari 64.03% (pemilih yang terdaftar sejumlah 40.456.877) dengan hasil : untuk keanggotaan Inggris di EEC 17.378.581 (67.2%), untuk keanggotaan Inggris keluar dari EEC 8.470.073 (32.8%), Suara sah 25.848.654, Suara tidak sah 54.540, Total suara 25.903.194 (Miller, The 1974-75 UK Renegotiation of EEC Membership and Referendum, 2015).

Timeline Inggris dan Uni Eropa :

Juli 1961	Aplikasi pertama Inggris terkait keanggotaan dalam EEC
14 Januari 1963	Veto pertama De Gaulle's terhadap aplikasi Inggris pertama
Oktober 1964	Kemenangan Partai Buruh dalam pemilu Inggris; Harold Wilson menjadi Perdana Menteri Inggris

Mey 1967	Aplikasi kedua Inggris terkait keanggotaan dalam EEC (masa pemerintahan Harold Wilson)
19 Desember 1967	Veto kedua De Gaulle's terhadap aplikasi Inggris kedua
Desember 1969	KTT Hague antara kepala negara anggota EEC untuk penambahan anggota atau perluasan anggota member EEC
June 1970	Kemenangan Partai Konservatif pada pemilu Inggris; Edward Heath menjadi Perdana Menteri Inggris; pengajuan aplikasi ketiga Inggris untuk keanggotaan dalam EEC
Musim Panas 1971	Negosiasi antara Inggris dan EEC dan menghasilkan hasil yang sukses
Januari 1972	Penandatanganan perjanjian terhadap masuknya Inggris, Denmark, dan Irlandia ke dalam EEC
1 Januari 1973	Inggris resmi menjadi anggota dari EEC
Februari 1974	Kemenangan Partai Buruh dalam pemilu Inggris; Harold Wilson menjadi Perdana Menteri
9-10 Desember 1974	KTT Paris antara kepala pemerintahan dan negara : pembuatan the European Council

Maret 1975	Dewan Eropa Dublin; pembuatan Dana Pembangunan Daerah Eropa (ERDF)
6 Juni 1975	Referendum Inggris dengan hasil Inggris lanjut menjadi anggota dari EEC

Tabel 2 - Timeline proses Inggris Raya masuk dalam Uni Eropa

(Sumber : Murlon-Druol, 2015)